BAB l

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Interaksi antar aktor dalam penanganan kejahatan jalanan, khususnya begal, merupakan aspek yang sangat penting namun masih belum berjalan secara optimal di berbagai daerah, termasuk di Kota Lhokseumawe. Ketidakefektifan interaksi tersebut terlihat dari masih lemahnya koordinasi, komunikasi, serta kerja sama antar pihak yang terlibat, sehingga berdampak pada belum maksimalnya upaya penanganan yang dilakukan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kejahatan begal belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Upaya penanganan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan tindakan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana proses penanganannya dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai pihak yang terlibat. Hal ini tercantum dalam KUHP begal, ke dalam Tindak Pidana Pencurian Bab XXII khususnya diatur dalam pasal 362 hingga 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian bisa diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain sebagian maupun seluruhnya untuk dimiliki sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Secara khusus pasal 365 KUHP Memberikan batasan pendekatan atas “begal” dari pencurian karena pembegalan sebelum mengambil harta orang memberikan lain, kekerasan begal atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian itu. Sanksi atas Pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama sembilan tahun dan paling lama 12 Tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan Konsekuensi umum. jika Salah satu Sebagai korban Pembegalan sampai meninggal dunia, Begal dapat

diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup (Hasanah, 2022) .

Dengan demikian penanganan begal pada dasarnya melibatkan beberapa aktor penting, seperti kepolisian sebagai penegak hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai penegak ketertiban umum, pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan, serta masyarakat sebagai bagian yang secara langsung merasakan dampak dari permasalahan tersebut. Setiap aktor memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, sehingga diperlukan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan tugas agar penanganan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, interaksi antar aktor menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penanganan begal. Interaksi ini mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, koordinasi, serta kerja sama yang dilakukan antar pihak. Interaksi yang terjalin dengan baik akan menciptakan sinergi antar aktor, sehingga setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal dan saling mendukung dalam proses penanganan. Sebaliknya, apabila interaksi tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas penanganan di lapangan.

Fenomena interaksi antar aktor dalam penanganan begal masih menghadapi berbagai permasalahan. Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan dalam menjalin komunikasi yang efektif, serta belum optimalnya pembagian peran seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan penanganan yang terintegrasi. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan program juga turut mempengaruhi kualitas interaksi yang terjadi. Kondisi ini menyebabkan upaya

penanganan begal belum berjalan secara maksimal dan masih menyisakan berbagai permasalahan di masyarakat.

Secara normatif, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah diatur dalam berbagai regulasi daerah**,** seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjadi dasar dalam penegakan hukum di wilayah Aceh. Selain itu, terdapat pula Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mengatur peran pemerintah daerah serta aparat terkait dalam menjaga kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat**.** Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan gangguan keamanan, termasuk kejahatan begal, telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang optimal di lapangan, khususnya dalam hal interaksi antar aktor yang terlibat. Masih terdapat kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada bagaimana hubungan dan interaksi antar aktor tersebut dijalankan secara efektif.

Lebih lanjut, lemahnya interaksi antar aktor juga dapat berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lain, seperti terjadinya tumpang tindih kewenangan, lambatnya respons terhadap kejadian di lapangan, serta kurangnya sinergi dalam pelaksanaan tugas. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi efektivitas penanganan begal dan berpotensi menyebabkan permasalahan yang sama terus berulang di masyarakat (Kalo et al., 2021)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa interaksi antar aktor merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penanganan begal. Apabila interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan tercipta kerja sama yang solid dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, jika interaksi tidak berjalan secara optimal, maka upaya penanganan yang dilakukan akan cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai interaksi para aktor yang terlibat dalam penanganan begal di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan data dokumen jumlah pelaku begal yang ditangkap oleh tim Resmob Polres Lhokseumawe sebanyak 5 pelaku. (detikNews, minggu 04 juni 2019).

(Sumber: detiknews,2020) https://apps.detik.com/detik/

Berdasarkan hasil observasi dari berita tersebut terdapat beberapa aktor yang berperan dalam penanganan begal di Kota Lhokseumawe. Salah satunya Kapolsek Polsek Banda Sakti yaitu melaksanakan program Patroli Malam Hari sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas, begal. Satpol PP/WH Kota Lhokseumawe melaksanakan program pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Selain itu, Satlantas Polres Lhokseumawe menjalankan program Polisi Saweu Sikula sebagai bentuk edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan berlalu lintas serta pencegahan kenakalan remaja yang berpotensi mengarah pada tindakan kriminal. Di tingkat gampong, Geuchik turut berperan melalui kegiatan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Berbagai program tersebut menunjukkan adanya upaya dari masing-masing aktor dalam menangani begal di

Kota Lhokseumawe. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, terutama pada aspek koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar aktor sehingga interaksi yang terjalin belum berjalan secara optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai interaksi dan kolaborasi antaraktor dalam penyelesaian berbagai permasalahan publik. Lina Herlina (2021) menjelaskan bahwa koordinasi dan kerja sama yang terjalin antaraktor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, Resmeita (2025) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif serta sinergi antarlembaga mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Anisa Aulia Putri (2024) juga mengemukakan bahwa kolaborasi antaraktor diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang lebih optimal melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Sementara itu, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh proses interaksi yang dibangun melalui komunikasi, koordinasi, komitmen bersama, dan kepercayaan antaraktor. Selain itu, Nurharyati dan Rahman (2024) menyatakan bahwa hubungan kerja sama yang baik antarlembaga menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan publik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas pola interaksi para aktor berdasarkan teori R.A.W. Rhodes serta proses interaksi aktor berdasarkan teori Rosemary O'Leary dalam penanganan begal di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut sekaligus memberikan pemahaman mengenai pola dan proses interaksi para aktor dalam penanganan begal di Kota Lhokseumawe.

Dalam pelaksanaan program tersebut, setiap aktor memiliki peran dan pola interaksi yang saling berkaitan. Interaksi diawali dari masyarakat yang menyampaikan informasi kepada Geuchik apabila terjadi dugaan tindak begal di lingkungan gampong. Selanjutnya, Geuchik berkoordinasi dengan Polsek Banda Sakti sebagai pihak yang melakukan penanganan awal. Apabila kasus memerlukan penanganan lebih lanjut, Polsek akan berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Di sisi lain, Satpol PP/WH turut mendukung melalui kegiatan pembinaan, patroli, serta menjaga ketertiban umum. Pola interaksi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar aktor sangat diperlukan agar penanganan begal dapat berjalan secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola interaksi yang terjalin antar aktor yang terlibat dalam penanganan begal di kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat interaksi aktor dalam penanganan begal dikota lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas yang menjadi fokus penelitian dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Pola interaksi para aktor yang terlibat dalam penanganan begal di kota lhoseumawe.
2. Faktor pendukung dan penghambat interaksi para aktor dalam penanganan begal di kota lhoseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola interaksi antar aktor yang terlibat dalam penanganan begal di kota lhoseumawe
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat interaksi para aktor dalam penanganan begal dikota lhokseumawe

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam hal:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas interaksi, koordinasi, dan kerja sama dalam penanganan begal di Kota Lhokseumawe. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki pelaksanaan penanganan begal agar lebih terarah dan optimal.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antar aktor dalam penanganan masalah keamanan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

3. Manfaat Subjektif

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam memahami interaksi antar aktor dalam penanganan begal, serta sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.